

Analisis Kinerja Keuangan Desa Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Pada Desa Ranoramba Kecamatan Ende Kabupaten Ende Tahun 2021-2023

Nuraini Ismail¹, Maria Valensia Birhi², Hermanus Reo³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Flores

ABSTRAK

The purpose of this research is to analyze the financial performance of Ranoramba Village, Ende District, and Ende Regency for the years 2021-2023 based on the independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, and growth ratio. The sample in this study is the realization report of the village budget of Ranoramba for the years 2021-2023. The data analysis used in this study is quantitative descriptive. The research results show that the financial performance of Ranoramba Village in 2021-2023, based on the independence ratio, is classified as very low; based on the effectiveness ratio, it falls into the ineffective category; based on the efficiency ratio, it is categorized as inefficient; and based on the original village income growth ratio, there is a significant increase in original village income, categorized as high.

Keywords : Village Financial Performance, Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Growth Ratio.

✉ Penulis yang sesuai:

Alamat Email: nurainiismail655@gmail.com

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan desa suatu pengakuan dan penghormatan, redistribusi sumber daya serta kewenangan pembangunan secara penuh. Desa diberikan wewenang untuk mengelola urusan rumah tangganya, termasuk untuk mengelola keuangannya. Desa bukan lagi dijadikan sebagai objek melainkan sebagai subjek untuk pembangunan yang dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan manfaat bagi penyelenggaraan pembangunan desa secara mandiri (Endah, 2018).

Desa adalah salah satu pemerintahan yang kekuasaannya dibawah pemerintah daerah (Sibarani, 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan menyeluruh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan keuangan yang direncanakan dalam waktu tahunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, dimana pembahasannya dan penetapannya dilakukan oleh Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dilakukan sesuai peraturan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memiliki tahun anggaran mencakup masa satu tahun, dimana permulaannya dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Desa memiliki pendapatan desa secara tersendiri yang asli dari desanya atau pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi, bagian dana perimbangan yang berasal dari daerah dan pusat, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta hibah dan sumbangan yang tidak memiliki ikatan dengan pihak lain (Lastari et al, 2020).

Tujuan dari keuangan desa adalah berfokus pada pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat desa. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa. Transparansi yang dimaksudkan terutama dalam hal informasi keuangan dan pengelolaan keuangan yang harus dilakukan dalam bentuk relevan dan mudah dipahami oleh pihak eksternal maupun masyarakat desa tersebut. Transparansi keuangan desa sangatlah penting bagi masyarakat desa, dengan transparannya keuangan desa maka masyarakat desa bisa mengetahui sampai mana kinerja desa dalam mengalokasikan keuangan desannya yang bertujuan untuk menyejahterakan seluruh masyarakat desa (Sibarani, 2023)

Kinerja merupakan suatu tingkat pencapaian terhadap apa yang direncanakan, baik secara pribadi maupun oleh organisasi. Kinerja keuangan desa adalah tingkat pencapaian dari suatu perencanaan yang dituangkan dalam APBDes yang meliputi anggaran dan realisasi (Harahap, 2020). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dan pemerintah desa sangat berbeda dengan analisis kinerja keuangan perusahaan, selain berbasis anggaran, keuangan pemerintah daerah atau desa tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba (profits atau net income) seperti perusahaan. Analisis kinerja keuangan sangat penting bagi pemerintah desa karena dengan analisis kinerja ini pemerintah desa dapat mengetahui bagaimana kinerja pemerintahannya selama tahun anggaran tertentu. Dengan melakukan analisis kinerja, pemerintah desa dapat melihat bagaimana pencapaian yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan, untuk mengevaluasi kinerja pemerintahannya, serta sebagai pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan pada periode berikutnya (Eva, Y S., 2019).

Analisis Kinerja Keuangan Desa Dengan Menggunakan.....

Untuk menilai kinerja keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan. Ada empat jenis rasio keuangan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan. Pertama, rasio kemandirian keuangan yang bertujuan untuk menilai kemampuan suatu desa dalam membiayai sendiri urusan pemerintahan, kegiatan pembangunan, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kedua, rasio efektivitas yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah desa dalam memperoleh pendapatan asli desa dibandingkan dengan yang dianggarkan. Ketiga, rasio efisiensi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengeluaran dibandingkan dengan penerimaan desa. Keempat, rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah desa dalam tahun anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan asli desa (Susanto, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu telah menganalisis kinerja keuangan desa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda (2022), bahwa kinerja keuangan Desa Serasah berdasarkan rasio derajat desentralisasi dikategorikan sangat kurang, rasio kemandirian keuangan daerah dikategorikan rendah sekali, rasio efektivitas pendapatan asli daerah dikategorikan tidak efektif, rasio efisiensi belanja dikategorikan tidak efisien dan pertumbuhan menunjukkan trend negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Sobaruddin (2019), hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Desa Mergosari berdasarkan rasio efektivitas dikategorikan efektif, rasio efisien dikategorikan sudah efisien sedangkan rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek, dkk (2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Desa Pejarakan tahun 2015-2019 berdasarkan rasio kemandirian masih sangat rendah, berdasarkan rasio efektivitas sudah sangat efektif, berdasarkan rasio efisiensi sudah efisien dan berdasarkan rasio pertumbuhan tergolong sedang. Penelitian yang dilakukan oleh Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani, dkk (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Bulak tahun 2015-2017 berdasarkan rasio kemandirian daerah dikategorikan rendah, rasio keserasian dikategorikan kurang serasi, rasio pertumbuhan dikategorikan cukup baik, rasio efisiensi dikategorikan belum efisien dan berdasarkan rasio efektivitas sudah efektif.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Kadek, dkk (2022) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Desa Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Pada Pemerintah Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah desa. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yaitu Desa Ranoramba Kecamatan Ende Kabupaten Ende.

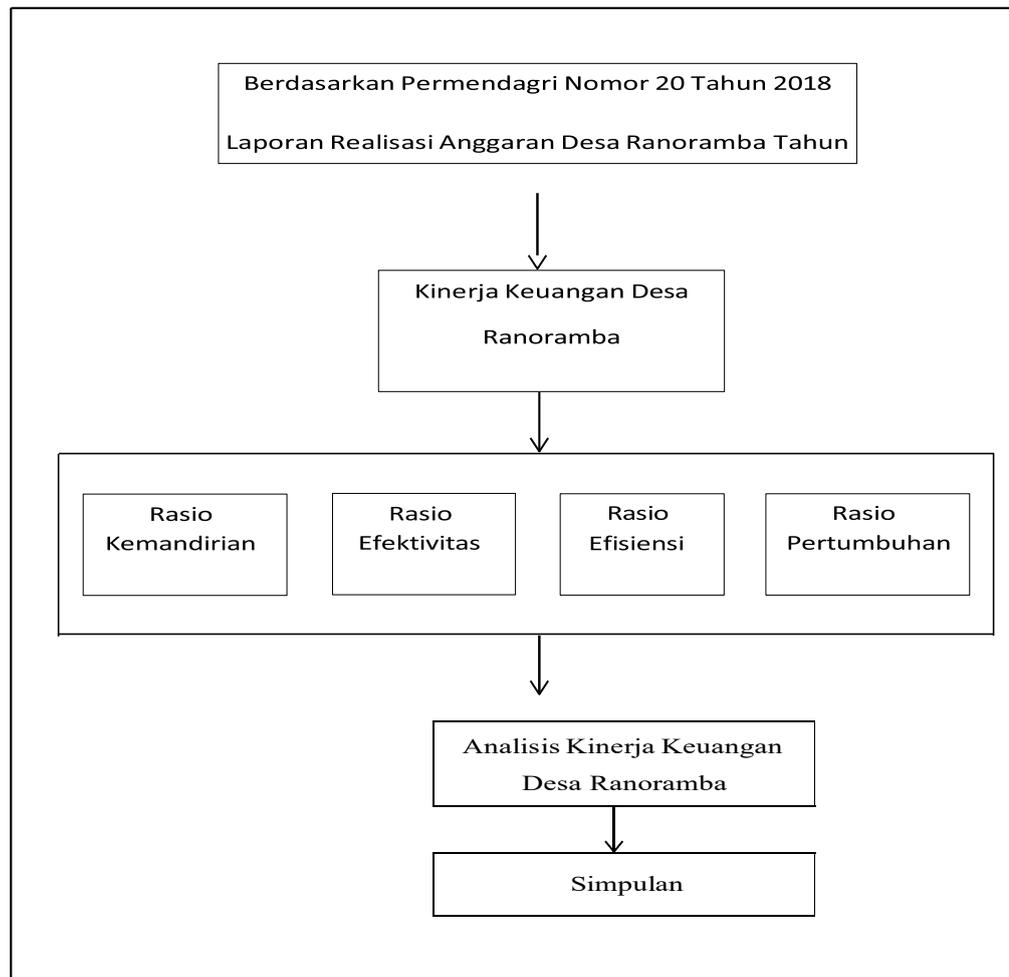
Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Ranoramba karena rendahnya kemampuan desa untuk menggali potensi sumber pendaptan asli desa. Hal ini tercemin dari penerimaan pendapatan asli desa yang relative kecil dibandingkan pendapatan transfer sehingga masih tingginya ketergantungan desa terhadap bantuan pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Desa Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Pada Desa Ranoramba Kecamatan Ende Kabupaten Ende Tahun 2021-2023”.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan desa dengan menggunakan rasio keuangan pada Desa Ranoramba Kecamatan Ende Kabupaten Ende Tahun 2021-2023.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari tingkat kedalaman, maka jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kinerja keuangan pemerintah Desa Ranoramba tahun 2021-2023. Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Desa Ranoramba Kecamatan Ende Kabupaten Ende. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APB Desa Ranoramba tahun 2021-2023. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi, Wawancara Dokumentasi dan Studi kepustakaan. Penelitian ini dapat dijabarkan melalui kerangka piker di bawah ini:



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Kemandirian Keuangan Desa

Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Kemandirian Desa Ranoramba Tahun Anggaran 2021-2023

Tahun	Pendapatan Asli Desa	Pendapatan Tranfer	Rasio Kemandirian	Kriteria
2021	1.050.000	886.584.660	0,12%	Sangat Rendah
2022	1.650.000	892.859.184	0,18%	Sangat Rendah
2023	2.500.000	919.088.196	0,27%	Sangat Rendah

Kinerja keuangan Desa Ranoramba tahun anggaran 2021-2022 berdasarkan rasio kemandirian berada pada kategori sangat rendah dengan rata-rata nilai rasio sebesar 0,19%. Rasio kemandirian keuangan Desa Ranoramba pada tahun 2021 sebesar 0,12%, tahun 2022 sebesar 0,18%, tahun 2023 sebesar 0,27%. Tingkat kemandirian keuangan yang sangat rendah menunjukkan bahwa Desa Ranoramba masih sangat bergantung dengan bantuan dana dari pemerintah pusat dan daerah dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Rasio Efektivitas

Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Efektivitas Desa Ranoramba Tahun Anggaran 2021-2023

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Desa	Anggaran Pendapatan Asli Desa	Rasio Efektivitas	Kriteria
2021	1.050.000	0%	0%	-
2022	1.650.000	1.650.000	100%	Efektif
2023	2.500.000	2.500.000	100%	Efektif

Kinerja keuangan Desa Ranoramba tahun anggaran 2021 berdasarkan rasio efektivitas sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa, pada tahun 2021 Desa Ranoramba tidak menganggarkan pendapatan asli desa karena masih berada pada pandemi covid-19. Tahun 2022 sampai tahun 2023 tingkat efektivitas keuangan Desa Ranoramba kembali meningkat dan dikategorikan efektif dengan nilai rasio efektivitas pada tahun 2022 sebesar 100% dan tahun 2023 nilai rasio efektivitas sebesar 100%. Jadi, rata-rata nilai rasio efektivitas dari tahun 2021 sampai dengan 2023 sebesar 66,66%.

3. Rasio Efisiensi

Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Efisiensi Desa Ranoramba Tahun Anggaran 2021-2023

Tahun	Realisasi Belanja Desa	Realisasi Pendapatan Desa	Rasio Efisiensi	Kriteria
2021	904.459.660	895.797.131	100,97%	Tidak Efisien
2022	922.084.184	896.814.264	102,82%	Tidak Efisien
2023	939.924.352	924.169.582	101,70%	Tidak Efisien

Kinerja keuangan Desa Ranoramba tahun anggaran 2021-2023 berdasarkan rasio efisiensi untuk tahun 2021 sebesar 100,97%, tahun 2022 sebesar 102,82%, dan tahun 2023 sebesar 101,70% dikategorikan tidak efisien. Artinya, pengeluaran atau belanja desa yang dilakukan oleh Desa Ranoramba melebihi dari pendapatan yang diterima. Adapun rata-rata rasio efisiensi sebesar 101,83% sehingga kinerja keuangan Desa Ranoramba tahun anggaran 2021-2023 berdasarkan rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien.

Analisis Kinerja Keuangan Desa Dengan Menggunakan.....

4. Rasio Pertumbuhan

Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Desa Ranoramba Tahun Anggaran 2021-2023

Tahun	Realisasi PADes Tahun Sebelumnya	Realisasi PADes	Rasio Pertumbuhan	Kriteria
2021	0	1.050.000	0%	-
2022	1.050.000	1.650.000	57,14%	Tinggi
2023	1.650.000	2.500.000	51,51%	Tinggi

Kinerja keuangan Desa Ranoramba tahun anggaran 2021-2023 menunjukkan penurunan (pertumbuhan negatif) dan peningkatan (pertumbuhan positif). Pada tahun 2021 pendapatan asli desa yang diterima mengalami pertumbuhan negatif dengan nilai rasio 0 %. Penyebab penurunan pendapatan asli desa ini karena tidak adanya pendapatan asli desa yang diperoleh pada tahun sebelumnya yakni tahun 2020. Pada tahun 2022, terjadi pertumbuhan positif dengan nilai rasio 57,14% artinya mengalami peningkatan pendapatan asli desa dengan kategori tinggi. Pada tahun 2023, pendapatan asli Desa Ranoramba juga mengalami pertumbuhan positif dengan nilai rasio 51,51% artinya mengalami peningkatan pendapatan asli desa dengan kategori tinggi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Kinerja Keuangan Desa Ranoramba jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan Desa Ranoramba sangat rendah, dimana kemandirian keuangan Desa Ranoramba masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Pada tahun 2021, 2022 dan 2023 memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,19%. Hal itu terjadi karena bantuan pemerintah pusat terhadap Desa Ranoramba sangat tinggi dari pada pendapatan asli desa. Dimana pada tahun 2021 sebesar 0,12%, tahun 2022 sebesar 0,18%, dan tahun 2023 sebesar 0,27%.
- Kinerja Keuangan Desa Ranoramba jika dilihat dari rasio efektivitas tidak efektif. Pada tahun 2021, 2022, 2023 memperoleh nilai rata-rata sebesar 66,66%. Hal ini menggambarkan tingkat kemampuan desa yang belum baik dalam menganggarkan dan merealisasikan PADes, walaupun demikian pada tahun 2022 dan tahun 2023 pemerintah Desa Ranoramba sudah bisa dikatakan memiliki kinerja yang baik. Dimana pada tahun 2021 sebesar 0%, tahun 2022 sebesar 100%, dan tahun 2023 sebesar 100%.
- Kinerja Keuangan Desa Ranoramba jika dilihat dari rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, karena rata-rata rasio efisiensi sebesar 101,83%. Hal ini terjadi karena Desa Ranoramba untuk merealisasikan pendapatan yang dianggarkan, pemerintah desa mengeluarkan biaya atau belanja desa yang cukup besar. Dimana pada tahun 2021 sebesar 100,97%, tahun 2022 sebesar 102,82%, dan tahun 2023 sebesar 101,70%.
- Kinerja Keuangan Desa Ranoramba jika dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan asli desa mengalami peningkatan pendapatan asli desa dengan rata-rata nilai rasio adalah sebesar 54,33%. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Ranoramba telah mampu dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang diraih dari tahun 2021 sampai 2023. Dimana pada tahun 2021 sebesar 0%, tahun 2022 sebesar 57,14%, dan tahun 2023 sebesar 51,51%.

Referensi :

- Anugeraheni, N. K. D., & Yuniarta, G. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Desa dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 426–437.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi untuk Kecamatan dan desa*. Jakarta: Erlangga.

- Endah, K. (2018). Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal MODERAT*, 4(November), 25–33. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Fathah, R. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK: Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis dan Perbankan*, 8(1), 33–48.
- Hasan, H. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Makassar: Universitas Muhammadiyah.
- Huda, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari (Periode Tahun 2018-2020). 1–80.
- Lastari, D. dwi ayu, Pratiwi, I. B., Muchlisun, M., Kabib, N., & Anwar, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 01(09), 19–29.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). Akuntansi sektor publik-edisi terbaru. Penerbit Andi.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107.
- Permendagri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. In Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.
- Rahmadani, R., & Rudini, A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018-2021. *E-Jurnal Profit (Jurnal Penerapan Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan)*, 8(2), 133–143.
- Ramadhani, D. A. S., Hisamuddin, N., & Shulthoni, M. (2020). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Apbdesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.19184/jauj.v17i1.10687>
- Rantebalik, B., Tawakkal, T., & Sutrisna, A. (2018). Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(2).
- Ririn Agustawati, Ahmad Rifai, & Kausar. (2022). Analisis Hubungan Modal Intelektual (Intellectual Capital) Terhadap Kinerja Keuangan Bum Desa Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *Dinamika Pertanian*, 37(3), 243–254. [https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37\(3\).8933](https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37(3).8933)
- Sibarani, A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pada Desa Damuli Kebun Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- Siregar, B. (2017). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua Edisi Kedua.
- Sobarudin. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 – 2018). 1–54.
- Sugiyono. (2018). Prof. Dr. Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wida Puspawardani. (2017). Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Artikel Ilmiah*, 1–2.